



**RENCANA AKSI KINERJA
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**

**NOMOR: S-834/PW21/1/2022
TANGGAL: 6 APRIL 2022**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya Nomor 3, Bumi Tamalanrea Permai - Makassar
Telepon (0411) 590591 - 590592, Faksimile (0411) 590595
Email : sulsel@bpkp.go.id

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, kami telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

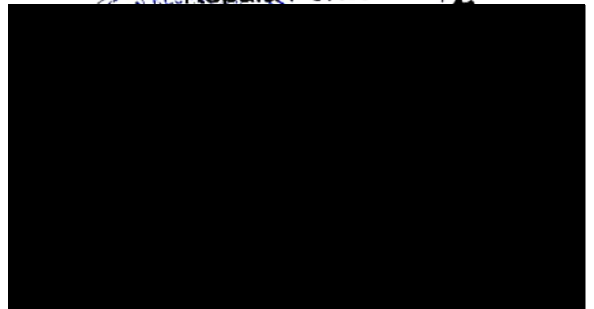
Rencana aksi kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

- 1) Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
- 2) Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
- 3) Sarana untuk monitoring, evaluasi; dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Makassar, 6 April 2022

Kepala Perwakilan, /



Rizal Suhaili

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	RPL			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
BIDANG IPP																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	0	-	-	-	-	1	Pengawasan atas Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Dinas Pendidikan A Kab/Kota/Prov A	Sedang	13,514,000	IPP	PP	-	1.00	-	-
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1.00	-	1.00	-	-	2	Pengawasan atas Bantuan Operasional Sekolah	Tinggi	50,465,000	IPP	PP	1.00	-	-	-
		Jumlah Proyek Strategis Nasional yang diawasi	PSN	0	-	-	-	-	3	Pengawasan atas Program Indonesia Pintar	Tinggi	60,280,000	IPP	PP	1.00	1.00	1.00	-
									4	Pengawasan Sarana Prasarana Pendidikan	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-
									5	Pengawasan Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Lingkungan Kemendikbud	Sedang	11,314,000	IPP	PP	-	1.00	-	-
									6	Pengawasan atas Implementasi Reformasi Birokrasi	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-
									7	Evaluasi Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes	Sedang	13,984,315	IPP	PP	-	1.00	-	1.00
									8	Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TNI/Polri	Sedang	16,708,000	IPP	PP	1.00	1.00	-	-
									9	Pengawasan atas Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-
									10	Pengawasan atas Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-
									11	Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Alam	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-
									12	Pengawasan atas Dukungan Peralatan Produksi Pertanian	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-
									13	Pengawasan atas Dukungan Peralatan Produksi Perikanan	Sedang	-	IPP	PP	-	-	1.00	-
									14	Pengawasan atas Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun) di Provinsi Sulawesi Selatan	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00
									15	Pengawasan atas Pembangunan infrastruktur SPAM di Provinsi Sulawesi Selatan	Sedang	20,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00
									16	Pengawasan atas Pembangunan infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di Provinsi Sulawesi Selatan	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00
									17	Pengawasan atas pembangunan infrastruktur jalan tol di Provinsi Sulawesi Selatan	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00
									18	Pengawasan Program PEN Sektor UKM Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM)	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00
									19	Pengawasan atas P3DN 10 K/L	Sedang	77,600,000	IPP	K/L	-	1.00	1.00	1.00
									20	Pengawasan atas Stimulus Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi COVID-19 pada Kemenparekraf/Baparekraf	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00
									21	Optimalisasi Pemanfaatan KPBU	Sedang	29,500,000	IPP	Kabupaten/Kota/Provinsi	1.00	-	-	-
									22	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan Layanan Primer	Tinggi	250,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00
									23	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan Layanan Rujukan	Sedang	25,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00
									24	Pengawasan atas tata kelola Proyek Strategis Nasional pembangunan jaringan gas alam	Sedang	13,056,000	IPP	Kabupaten	-	1.00	-	1.00
									25	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter	Sedang	13,056,000	IPP	Kabupaten	-	1.00	-	1.00
									26	Audit Kinerja Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR Tahun 2021	Sedang	10,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	RPL			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
									27	Pengawasan atas Peningkatan Akses Permodalan	-	IPP		-	-	1.00	-	
									28	Pengawasan atas implementasi program sertifikasi tanah (PTSL) pada Kementerian ATR/BPN di Provinsi Sulawesi Selatan	30,540,000	IPP	PP	-	-	-	1.00	
									29	Pengawasan atas Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022	20,750,000	IPP	PP	-	-	-	1.00	
									30	Pengawasan atas tata kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Paselloreng	13,396,000	IPP	Kabupaten	-	1.00	-	1.00	
									31	Pengawasan atas tata kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Karalloe	18,056,000	IPP	Kabupaten	-	1.00	-	1.00	
									32	Pengawasan atas tata kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Pamukkulu	18,056,000	IPP	Kabupaten	-	1.00	-	1.00	
									33	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kereta Api Makassar - Parepare	15,540,000	IPP	Kabupaten	-	1.00	-	1.00	
									34	Pengawasan atas tata kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Baliase	15,540,000	IPP	Kabupaten	-	1.00	-	1.00	
									35	Pengawasan atas tata kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Mamminasata	15,540,000	IPP	Kabupaten	-	1.00	-	1.00	
									36	Pengawasan atas tata kelola Proyek Strategis Nasional Program Pemerataan Ekonomi	15,540,000	IPP	PP	-	1.00	-	1.00	
									37	Verifikasi Pencapaian Disbursement Linked Indicator (DLI) (10PP)	62,794,000	IPP	PP	-	-	-	1.00	
									38	Infrastruktur Jaringan Irigasi	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-	
									39	Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi di Provinsi Sulawesi Selatan	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-	
									40	Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu	15,000,000	IPP	Provinsi	-	-	1.00	1.00	
									41	Evaluasi pada Perguruan Tinggi	8,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00	
									42	Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependudukan	8,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-	
									43	Pengawasan atas Program Vaksinasi	19,034,000	IPP	PP	1.00	1.00	1.00	1.00	
									44	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan	25,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00	
									45	Pengawasan atas Penurunan Beban Pengeluaran - PKH	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-	
									46	Pengawasan atas Penurunan Beban Pengeluaran - Kartu Sembako	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-	
									47	Pengawasan atas Penurunan Beban Pengeluaran - Kartu Indonesia Sehat	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-	
									48	Pengawasan atas Peningkatan Pendapatan - Peningkatan Aset Produktif	-	IPP	PP	-	-	1.00	-	
									49	Pengawasan atas Program Penanggulangan Bencana	15,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-	
									50	Pengawasan atas Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)	15,000,000	IPP	PP	1.00	-	-	-	
									51	Pengawasan atas DLI Program Reformasi Bantuan Sosial	10,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00	

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	RPL			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
									52	Pengawasan atas Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	10,000,000	IPP	PP	1.00	-	-	-	
									53	Pengawasan atas Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	81,242,685	IPP	PP	-	1.00	-	-	
									54	Pengawasan atas Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	54,840,000	IPP	PP	1.00	-	-	-	
									55	Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	6,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-	
									56	Pengawasan atas Tata Kelola Program Benih Unggul Tahun 2021 dan 2022	25,000,000	IPP	PP	-	-	1.00	-	
									57	Pengawasan atas Tata Kelola Program Bibit Ternak Tahun 2021 dan 2022	25,000,000	IPP	PP	-	-	-	1.00	
									58	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	62,794,000	IPP	PP	-	-	-	1.00	
									59	Audit atas Laporan Keuangan DOISP II Loan IBRD 8711-ID dan AIB 000010-IDN pada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021	-	IPP	PP	1.00	1.00	-	-	
									60	Pengawasan atas Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan Tahun 2022 (Monitoring 1 ST dan Reviu 2 ST)	-	IPP	PP	1.00	-	1.00	1.00	
									61	Pengawasan Penanganan Covid-19- Pembayaran Klaim Rumah Sakit	-	IPP	PP	-	-	-	1.00	
BIDANG APD																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Juta)	758.00	-	-	-	758.00	1	Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah	Sedang	-	APD	PP	-	-	1.00	-
2		Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	1.673,50	-	-	-	1.673,50	2	Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan Covid-19 pada Pemda	Sedang	25,000,000	APD	PP	2.00	-	-	-
3		Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	154.035	50,000	54,035	-	50,000	3	Bimtek Peningkatan Implementasi SAKIP Pemda	Sedang	26,550,625	APD	PP	1.00	-	-	-
4		Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	0	-	-	-	-	4	Bimtek Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemda A	Sedang	22,845,000	APD	PP	-	-	1.00	-
5		Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Juta)	0	-	-	-	-	5	Evaluasi atas Implementasi Bantuan Sosial Bersumber dana APBD	Sedang	25,000,000	APD	PP	-	1.00	-	-
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang diawasi	Kegiatan Prioritas	0	-	-	-	-	6	Evaluasi atas Pengembangan Kawasan Luwu dan Sekitarnya	Tinggi	60,828,000	APD	PP	1.00	-	-	-
7		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	0	-	-	-	-	7	Evaluasi atas Penyaluran BLT-DD	Sedang	25,000,000	APD	PP	-	2.00	-	-
8		Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	PSN	0	-	-	-	-	8	Evaluasi atas Tata Kelola Cadangan Pangan pada Pemerintah Daerah	Sedang	25,000,000	APD	PP	-	-	1.00	-
9		Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Persen	0	-	-	-	-	9	Evaluasi atas Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa	Sedang	25,000,000	APD	PP	3.00	-	-	-
10	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Provinsi	1.00	-	1.00	-	-	10	Evaluasi dan Monitoring atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	Sedang	15,000,000	APD	PP	5.00	-	-	-
11		Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/Kota	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11	Evaluasi implementasi Perizinan Berusaha (OSS) di Daerah	Sedang	-	APD	PP	-	3.00	-	-
12		Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Provinsi	0	-	-	-	-	12	Evaluasi Pengembangan Infrastruktur Balai Benih Tanaman Pangan Bersumber Dana APBD	Tinggi	40,000,000	APD	PP	-	-	1.00	-

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	RPL			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
13		Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/Kota	3.00	-	-	-	3.00	13	Evaluasi Pengembangan Infrastruktur pelabuhan perikanan bersumber dana APBD	Sedang	-	APD	PP	-	-	1.00	-
14		Persentase Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	14	Evaluasi Program Pengembangan Potensi Desa	Sedang	25,000,000	APD	PP	-	-	1.00	-
15		Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	8.00	-	-	-	8.00	15	Konsultansi Implementasi SIMDA-NG (FMIS)/CACM Pemda A	Sedang	25,000,000	APD	PP	-	-	-	1.00
16		Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	111.00	-	-	111.00	-	16	Konsultansi Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Opini LKPD	Sedang	25,000,000	APD	PP	1.00	-	-	-
									17	Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN)	Sedang	25,000,000	APD	PP	1.00	-	-	-
									18	Monitoring dan Evaluasi atas Akuntabilitas Tata Kelola Aset Desa	Sedang	25,000,000	APD	PP	3.00	-	-	-
									19	Pelaksanaan Evaluasi OPAD Pada pemda A	Sedang	-	APD	PP	-	2.00	-	-
									20	Pelaksanaan Evaluasi PA PBJ Tw I, Tw II, Tw III, dan Tw IV	Sedang	25,000,000	APD	PP	2.00	-	-	-
									21	Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Daerah Pemda A	Sedang	69,461,692	APD	PP	4.00	-	-	-
									22	Pendampingan penyusunan Action Plan peningkatan kualitas LKPD Tahun 2022	Sedang	17,595,000	APD	PP	-	3.00	-	-
									23	Pengawasan Aset strategis Pemda	Sedang	25,000,000	APD	PP	-	1.00	-	-
									24	Pengawasan atas Dukungan Peralatan Produksi Pertanian Tahun 2021 dan 2022	Sedang	25,000,000	APD	PP	-	-	1.00	-
									25	Pengawasan atas pengembangan kawasan geopark maros pangkep	Tinggi	73,828,000	APD	PP	1.00	1.00	1.00	1.00
									26	Pengawasan atas Peningkatan Maturitas SPIP	Tinggi	87,632,000	APD	PP	11.00	-	-	-
									27	Pengawasan atas Tata Kelola Bibit Ternak Tahun 2021 dan 2022 pada kabupaten A	Sedang	25,000,000	APD	PP	-	-	1.00	-
									28	Pengawasan atas Tata Kelola Program Benih Unggul Tahun 2021 dan 2022	Sedang	25,000,000	APD	PP	1.00	-	-	-
									29	Pengawasan P3DN Daerah	Tinggi	-	APD	PP	-	6.00	-	-
									30	Pengawasan Penggunaan Dana Transfer pada Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah	Sedang	25,000,000	APD	PP	-	-	5.00	-
									31	Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Sedang	15,595,000	APD	PP	-	-	1.00	-
									32	Reviu Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah	Sedang	25,000,000	APD	PP	1.00	-	-	-
									33	Tata Kelola PSN Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Sedang	-	APD	PP	-	2.00	-	-
									34	Workshop / Bimbingan Teknis Keuangan dan Pembangunan Desa	Tinggi	220,343,000	APD	PP	1.00	-	-	-
BIDANG AKUNTAN NEGARA																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0	-	-	-	-	1	Evaluasi Pemanfaatan Jargas dalam menekan subsidi elpiji 3kg	Sedang	8,455,077	AN	PP	-	-	1.00	-
		Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	10.00	-	5.00	-	5.00	2	Kualitas Pengendalian Intern pada BUMD, BLU dan BLUD	Sedang	34,375,000	AN	PP	-	-	-	1.00
		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BUMD	4.00	-	2.00	1.00	-	3	Pengawasan Akses Permodalan bagi Masyarakat Miskin	Sedang	8,455,077	AN	PP	-	-	1.00	-
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	55.00	-	-	55.00	-	4	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMN	Sedang	21,325,000	AN	PP	-	-	1.00	-
2	Meningkatnya Pengawasan Per	Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3	BUMN	1.00	-	-	-	1.00	5	Pengawasan atas aspek GRC pada aksi korporasi di lingkungan BUMD	Sedang	34,375,000	AN	PP	-	-	-	1.00

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	RPL				
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4	
		Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	6.00	-	-	-	6.00	6	Pengawasan atas Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin baik reguler maupun tambahan)	Sedang	8,455,077	AN	PP	-	1.00	-	1.00	
									7	Pengawasan atas pengajuan dan verifikasi klaim Covid-19 pada BPJS Kesehatan	Sedang	16,910,154	AN	PP	1.00	-	1.00	1.00	
									8	Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah pada BUMN	Sedang	8,455,077	AN	PP	-	-	1.00	-	
									9	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (BUMN/D)	Sedang	8,455,077	AN	PP	-	-	-	1.00	
									10	Pengawasan atas Tata Kelola PSN Sektor Pelabuhan pada BUMN	Sedang	8,455,077	AN	PP	-	-	-	1.00	
									11	Pengawasan atas tata kelola subsidi pupuk	Sedang	8,455,077	AN	PP	-	-	1.00	-	
									12	Pengawasan Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin)	Sedang	8,455,077	AN	PP	-	-	-	1.00	
									13	Pengawasan Kualitas Tata Kelola (GRC) dan kinerja keuangan, operasional BPD	Sedang	9,912,500	AN	PP	-	1.00	-	-	
									14	Pengawasan P3DN Dalam Rangka "Bangga Buatan Indonesia" pada BUMN/BLU (D402)	Sedang	16,910,154	AN	PP	-	1.00	1.00	1.00	
									15	Pengawasan P3DN Dalam Rangka "Bangga Buatan Indonesia" pada BUMN/BLU (D403)	Sedang	16,910,154	AN	PP	-	1.00	1.00	1.00	
									16	Pengawasan P3DN Dalam Rangka "Bangga Buatan Indonesia" pada BUMN/BLU (D405)	Sedang	16,910,154	AN	PP	-	1.00	1.00	1.00	
									17	Pengawasan P3DN Dalam Rangka "Bangga Buatan Indonesia" pada BUMN/BLU (D405)	Tinggi	56,100,000	AN	PP	-	1.00	-	-	
									18	Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan pada BUMN	Sedang	8,455,077	AN	PP	-	-	-	1.00	
									19	Pengawasan Penempatan Dana pada BPD	Tinggi	80,075,000	AN	PP	1.00	-	-	-	
									20	Pengawasan Peran BUM Desa terhadap Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan, dan Keperantaraan dengan BUMD/N pada Kab A	Sedang	-	AN	PP	-	-	1.00	-	
									21	Pengawasan Peran BUM Desa terhadap Program Pengembangan Potensi Desa dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan BUM Desa Kab A	Tinggi	55,785,000	AN	PP	-	-	1.00	-	
									22	Pengawasan terhadap kualitas tata kelola, manajemen risiko dan satuan pengawasan intern BU Jasa Air.	Sedang	6,515,000	AN	PP	-	1.00	-	-	
									23	Pengawasan terhadap Tata Kelola BLU Pendidikan dan BLUD Kesehatan	Sedang	-	AN	PP	-	1.00	1.00	-	
									24	Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD	Tinggi	134,000,000	AN	PP	-	-	-	1.00	
									25	Reviu Tata Kelola SPAM dan BJU Jasa Air	Sedang	20,000,000	AN	PP	-	-	-	1.00	
BIDANG INVESTIGASI																			
	1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah(Juta)	1,509.00	-	-	-	1,509.00	1	Deteksi Kecurangan	Tinggi	77,300,000	INVEST	PP	1.00	-	-	-
			Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah(Juta)	49,715.00	-	-	-	49,715.00	2	Pencegahan Kecurangan	Sedang	25,100,000	INVEST	PP	2.00	3.00	3.00	3.00
	2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85.00	-	-	-	85.00	3	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Sedang	15,383,000	INVEST	PP	-	-	-	3.00
	3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100.00	100.00	-	-	-	4	Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan	Sedang	37,760,000	INVEST	PP	-	-	-	2.00
			Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80.00	-	80.00	-	-	5	Respon Kecurangan	Tinggi	239,980,000	INVEST	PP	3.00	-	5.00	15.00

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	RPL			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
BIDANG P3A																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pa	Jumlah APiP Provinsi dengan Kemampuan APiP ≥ Level 3	Provinsi	1,00	-	-	-	1,00	1	Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Pengeluaran Keuangan Desa (ZPP)	Sedang	27,000,000	P3A	PP	2,00	-	1,00	-
		Jumlah APiP Kab/Kota dengan Kemampuan APiP ≥ Level 3	Kab/Kota	15,00	-	-	-	15,00	2	Pembinaan Penerapan JFA pada APiP KLD	Sedang	35,100,000	P3A	PP	-	-	4,00	-
		Jumlah APiP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APiP	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3	Pengawasan atas Peningkatan Kemampuan APiP	Tinggi	79,000,000	P3A	PP	8,00	-	4,00	-
									4	Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan (PAEP)	Sedang	65,403,000	P3A	PP	10,00	-	-	-
BAGIAN TATA USAHA																		
1	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	77,00	-	-	-	77,00	1	Penilaian RB Unit Kerja								77,00
2		Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95,00	-	-	-	95,00	2	Penyusunan Laporan Keuangan								95,00
3		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100,00	-	-	-	100,00	3	Penyusunan Laporan Keuangan								100,00
4		Nilai Pengeluaran BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80,00	-	-	-	80,00	4	Penyusunan Laporan BMN								80,00
5		Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	-	-	-	82,00	5	Penilaian SAKIP								82,00
6		Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100,00	-	-	-	100,00	6	Penilaian MR Unit Kerja								100,00
7		Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	65,00	-	-	-	65,00	7	Penilaian SPIP								65,00
8		Indeks Keuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	75,00	-	-	-	75,00	8	Survey Layanan Eksternal								75,00

